

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

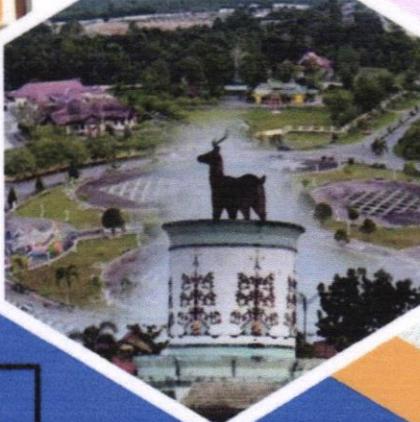


2024

LAPORAN HASIL REVIU (LHR)

ATAS DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
TA.2025 PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 700/124/VIII-LHR/2024/INSP-1
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2024



APIP APARAT
PENGAWAS
INTERN
PEMERINTAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 075 Nanga Bulik Kode Pos 74662

☎ (0532) 2071025 – 2071035; Fax : (0532) 2071034

Website : www.lamandaukab.go.id; E-mail : insplamandaukab@gmail.com

LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala perangkat daerah menyusun RKA-SKPD. Kepala perangkat daerah menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
2. Sesuai instruksi pimpinan, Inspektorat Kabupaten Lamandau melakukan reviu RKA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan pada dokumen RKA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 masih terdapat catatan, atas harga satuan belanja dalam kegiatan yang tidak menggunakan Zona Normal Dekat.

Hasil reviu selengkapnya tertuang pada URAIAN HASIL REVIU.

Dari hasil reviu tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Lamandau telah memberikan tanggapan atas Catatan Reviu yang disampaikan. Dinas Sosial Kabupaten Lamandau disarankan pula untuk menyesuaikan harga satuan belanja dalam kegiatan yang tidak menggunakan Zona Normal Dekat.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), dan KUA/PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah - kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-SKPD.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA-SKPD. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun

tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu RKA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 700/287/VIII/2024/INSP Tanggal 12 Agustus 2024, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penganggungjawab	:	Drs. Tahan NIP. 19660613 198692 1 002
Wakil Penanggungjawab	:	Aria Rusmade, SE NIP. 19770507 200312 1 005
Pengendali Teknis	:	Wilson, ST NIP. 19800629 200802 1 001
Ketua Tim	:	Indah Desy M S, SE NIP. 19801208 201001 2 009
Anggota Tim	:	1. Agung Yandifa, S.H NIP. 19940125 201903 1 006 2. Loli Pragawati, S.Hut NIP. 19800120 201503 2 002 3. Siti Raudah NIP. 19730818 200701 2 017Ssss 4. Diana Delang NIP. 19821202 200701 2 003

Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA. 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau; Dinas Sosial Kabupaten Lamandau; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lamandau; Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau; Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau; Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Lamandau; Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, Kantor Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau; Kantor Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau dan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari kerja, mulai tanggal 12 s.d. 28 Agustus 2024.

VI. GAMBARAN UMUM

1. RKA-SKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

- a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait.
- b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
- d. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan-pendekatan:

- a. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, yaitu suatu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

- b. Pendekatan prakiraan maju, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Pendekatan penganggaran terpadu, penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana (tidak mengenal anggaran belanja rutin dan pembangunan serta belanja aparatur dan belanja publik).
- d. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

Dalam pendekatan kinerja ada dua hal penting yang ditekankan, yaitu *output* dan *input*. *Output* (keluaran): barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan *input* yang digunakan. *Input* (masukan): besarnya sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu, dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan.

2. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sebesar Rp8.962.994.082,00 (*delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah*), dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut:

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4+5+6
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Daerah					
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
1.06.02.2 .02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.02.2 .02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	13.413.000	-	-	-	13.413.000
1.06.02.2 .03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4+5+6
1.06.02.2 .03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	16.466.500	-	-	-	16.466.500
1.06.02.2 .03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.461.000	-	-	-	43.461.000
1.06.02.2 .03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.068.00	-	-	-	30.068.00
1.06.02.2 .03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	74.956.000	-	-	-	74.956.000
1.06.02.2 .03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	35.158.000	-	-	-	35.158.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
1.06.04.2 .01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1.06.04.2 .01.0001	Penyediaan Permakanan	432.915.000	-	-	-	432.915.000
1.06.04.2 .01.0003	Penyediaan Alat Bantu	74.378.000	-	-	-	74.378.000
1.06.04.2 .01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	51.812.000	-	-	-	51.812.000
1.06.04.2 .01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	331.320.000	-	-	-	331.320.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4+5+6
1.06.04.2 .01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	225.998.000		-	-	225.998.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
1.06.05.2 .01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					
1.06.05.2 .01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	9.986.000		-	-	9.986.000
1.06.05.2 .01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	15.876.000		-	-	15.876.000
1.06.05.2 .02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.05.2 .02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	82.923.000		-	-	82.923.000
1.06.05.2 .02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	267.118.900		-	-	267.118.900
1.06.05.2 .02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.417.468.000		-	-	1.417.468.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
1.06.06.2 .01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
1.06.06.2 .01.0001	Penyediaan Makanan	326.025.875		-	-	326.025.875
1.06.06.2 .01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	6.422.000		-	-	6.422.000
1.06.06.2 .01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	309.420.000		-	-	309.420.000
1.06.06.2 .01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	6.664.000		-	-	6.664.000
1.06.06.2 .02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1.06.06.2 .02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Bencana Siaga	27.216.000		-	-	27.216.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
1.06.07.2 .01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
1.06.072. 01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	121.017.000		-	-	121.017.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4+5+6
1.06.072. 01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	20.000.000	-	-	-	20.000.000
1.06.072. 01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot	24.597.276	-	-	-	24.597.276
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.06.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.06.01.2 .010001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.446.000	-	-	-	38.446.000
1.06.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.06.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.648.361.902	-	-	-	2.648.361.902
1.06.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1.06.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.187.000	-	-	-	37.187.000
1.06.01.2 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	-	-	-	60.000.000
1.06.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1.06.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.235.000	-	-	-	18.235.000
1.06.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.667.400	-	-	-	54.667.400
1.06.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	44.950.000	-	-	44.950.000
1.06.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.638.400	-	-	-	28.638.400
1.06.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.561.000	-	-	-	38.561.000
1.06.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.760.000	-	-	-	5.760.000
1.06.01.2 .06.0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.829.000	-	-	-	422.829.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4+5+6
1.06.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1.06.01.2 .07.0001	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	-	50.000.000	-	-	50.000.000
1.06.01.2 .07.0005	<i>Pengadaan Mebel</i>	-	72.600.000	-	-	72.600.000
1.06.01.2 .06.0006	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	5.000.000	4.735.000	-	-	9.735.000
1.06.01.2 .06.0010	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	120.000.000	244.000.000	-	-	364.000.000
1.06.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.06.01.2 .08.0001	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	6.800.000	-	-	-	6.800.000
1.06.01.2 .08.0002	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	88.486.600	-	-	-	88.486.600
1.06.01.2 .08.0004	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	470.147.229	-	-	-	470.147.229
1.06.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.06.01.2 .09.001	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	12.400.000	-	-	-	12.400.000
1.06.01.2 .09.0002	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	211.210.000	-	-	-	211.210.000
1.06.01.2 .09.0006	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	26.300.000	-	-	-	26.300.000
1.06.01.2 .09.0009	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	289.000.000	-	-	-	289.000.000

Berdasarkan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Pagu Anggaran Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sebesar Rp8.962.994.082,00 (delapan miliar sembilan

ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Organis asi	Jumlah Plafon Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Dinas Sosial	4.998.314.531
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		38.446.000
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		38.446.000
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		2.648.361.902
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		2.648.361.902
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		97.187.000
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>		37.187.000
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		60.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		613.640.800
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		18.235.000
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		54.667.400
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>		44.950.000

	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		28.638.400
	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>		38.561.000
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</i>		5.760.000
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		422.829.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		411.794.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		50.000.000
	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		72.600.000
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		9.735.000
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>		364.000.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		417.101.640
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		6.800.000
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		88.486.600

	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		470.147.229
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		716.668.400
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		12.400.000
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		211.210.000
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		26.300.000
	<i>Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		289.000.000
2.	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	-	Dinas Sosial	213.522.500
2.1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		13.413.000
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>		13.413.000
2.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-		200.109.500

	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		16.466.500
	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		43.461.000
	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		30.068.000
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	Dinas Sosial	1.116.423.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-		1.116.423.000
	<i>Penyediaan Permakanan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		432.915.000
	<i>Penyediaan Alat Bantu</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		74.378.000
	<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</i>	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		51.812.000

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		331.320.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		225.998.000
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	Dinas Sosial	1.793.371.900
4.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-		25.862.000
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota		9.986.000
	Rujukan Anak – Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		15.876.000
4.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-		1.767.509.900
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		82.923.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		267.118.900
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1.417.468.000

5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	Dinas Sosial	675.747.875
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-		648.531.875
	<i>Penyediaan Makanan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		326.025.875
	<i>Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</i>	<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		6.422.000
	<i>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		309.420.000
	<i>Pelayanan Dukungan Psikososial</i>	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		6.664.000
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-		27.216.000
	<i>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</i>	<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		27.216.000
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	Dinas Sosial	165.614.276

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	165.614.276
	<i>Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<i>121.017.000</i>
	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>	<i>20.000.000</i>
	<i>Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<i>24.597.276</i>
Jumlah			8.962.994.082

3. Program RKA – SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lamandau, yaitu:

No.	Program	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.998.314.531
2.	Program Pemberdayaan Sosial	213.522.500
3.	Program Rehabilitasi Sosial	1.116.423.000
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.793.371.900
5.	Program Penanganan Bencana	675.747.875
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	165.614.276

VII. URAIAN HASIL REVIU

1. Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan KUA/PPAS.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKA-SKPD dengan KUA/PPAS telah sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD telah sesuai dengan KUA/PPAS.

2. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu anggaran, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD dengan KUA/PPAS.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu anggaran, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD telah sesuai dengan KUA/PPAS.

3. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran sudah bisa diukur.

4. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, penyusunan RKA SKPD telah sepenuhnya mematuhi/menerapkan kaidah – kaidah penganggaran.

5. Kelengkapan dokumen pendukung.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung telah lengkap.

6. Koreksi/Perbaikan Yang Belum/Tidak Disetujui.

Kesimpulan:

Harga satuan belanja dalam kegiatan yang tidak menggunakan Zona Normal Dekat.

Tanggapan SKPD:

Sudah menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang tersedia pada Aplikasi SIPD Tahun 2025.

7. Rekomendasi.

Agar menyesuaikan harga satuan belanja dalam kegiatan yang tidak menggunakan zona normal dekat.

VIII. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Lamandau menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat

mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.

Nanga Bulik, 30 Agustus 2024



Drs. TAHAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660613 198602 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 075 Nanga Bulik Kode Pos 74662
☎ (0532) 2071025 – 2071035; Fax : (0532) 2071034
Website : www.lamandaukab.go.id; E-mail : inspkablamandau@gmail.com

**CATATAN HASIL REVIU
(CHR)**

**ATAS RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

**NANGA BULIK
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

INSPEKTORAT

Alamat: Jl. Bukit Hibul Timur No. 075 Nanga Bulik; Kode Pos: 74662
☎ (0532) 2071025 - 2071035; Fax: (0532) 2071034
website: www.lamandaukab.go.id; e-mail: inspkablamandau@gmail.com

CATATAN HASIL REVIU

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

Inspektorat Kabupaten Lamandau	Disusun oleh	: Indah Desy M S, SE	
	Tanggal	: 26 Agustus 2024	
	Direviu oleh	: Indah Desy M S, SE	
	Tanggal	: 26 Agustus 2024	
	Diteliti oleh	: Wilson, ST	
	Tanggal	: 26 Agustus 2024	
	Disetujui oleh	: Aria Rusmade, SE	
	Tanggal	: 26 Agustus 2024	

URAIAN CATATAN HASIL REVIU RKA-SKPD

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Lamandau Nomor: 700/287/IIV/2024/INSP Tanggal 12 Agustus 2024 untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA. 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sebesar Rp8.962.994.082,00 (*delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah*), dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut:

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4+5+6
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Daerah					
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.02.2.02.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Berhadiah	13.413.000	-	-	-	13.413.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4+5+6
	Pengumpulan Uang atau Barang					
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.02.2.03.0 001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	16.466.500	-	-	-	16.466.500
1.06.02.2.03.0 002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.461.000	-	-	-	43.461.000
1.06.02.2.03.0 003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.068.00	-	-	-	30.068.00
1.06.02.2.03.0 004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	74.956.000	-	-	-	74.956.000
1.06.02.2.03.0 005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	35.158.000	-	-	-	35.158.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1.06.04.2.01.0 001	Penyediaan Permakanan	432.915.000	-	-	-	432.915.000
1.06.04.2.01.0 003	Penyediaan Alat Bantu	74.378.000	-	-	-	74.378.000
1.06.04.2.01.0 005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	51.812.000	-	-	-	51.812.000
1.06.04.2.01.0 006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	331.320.000	-	-	-	331.320.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4+5+6
	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
1.06.04.2.01.0 011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	225.998.000	-	-	-	225.998.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					
1.06.05.2.01.0 001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	9.986.000	-	-	-	9.986.000
1.06.05.2.01.0 002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	15.876.000	-	-	-	15.876.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.05.2.02.0 001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	82.923.000	-	-	-	82.923.000
1.06.05.2.02.0 002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	267.118.900	-	-	-	267.118.900
1.06.05.2.02.0 003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.417.468.000	-	-	-	1.417.468.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
1.06.06.2.01.0 001	Penyediaan Makanan	326.025.875	-	-	-	326.025.875
1.06.06.2.01.0 003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	6.422.000	-	-	-	6.422.000
1.06.06.2.01.0 004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	309.420.000	-	-	-	309.420.000
1.06.06.2.01.0 005	Pelayanan Dukungan Psikososial	6.664.000	-	-	-	6.664.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1.06.06.2.02.0 002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	27.216.000	-	-	-	27.216.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
1.06.072.01.0 001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam	121.017.000	-	-	-	121.017.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4+5+6
	Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
1.06.072.01.002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	20.000.000	-	-	-	20.000.000
1.06.072.01.003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.597.276	-	-	-	24.597.276
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.06.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.446.000	-	-	-	38.446.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.06.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.648.361.902	-	-	-	2.648.361.902
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1.06.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.187.000	-	-	-	37.187.000
1.06.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	-	-	-	60.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1.06.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.235.000	-	-	-	18.235.000
1.06.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.667.400	-	-	-	54.667.400
1.06.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	44.950.000	-	-	44.950.000
1.06.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.638.400	-	-	-	28.638.400
1.06.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.561.000	-	-	-	38.561.000
1.06.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.760.000	-	-	-	5.760.000
1.06.01.2.06.005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.829.000	-	-	-	422.829.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4+5+6
1.06.01.2.07.0 001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	50.000.000	-	-	50.000.000
1.06.01.2.07.0 005	Pengadaan Mebel	-	72.600.000	-	-	72.600.000
1.06.01.2.06.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	4.735.000	-	-	9.735.000
1.06.01.2.06.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	244.000.000	-	-	364.000.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.06.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.800.000	-	-	-	6.800.000
1.06.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.486.600	-	-	-	88.486.600
1.06.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	470.147.229	-	-	-	470.147.229
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.06.01.2.09.0 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.400.000	-	-	-	12.400.000
1.06.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.210.000	-	-	-	211.210.000
1.06.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.300.000	-	-	-	26.300.000
1.06.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289.000.000	-	-	-	289.000.000

Berdasarkan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, Pagu Anggaran Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sebesar Rp8.962.994.082,00 (delapan milyar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Organisasi	Jumlah Plafon Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Dinas Sosial	4.998.314.531
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		38.446.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		38.446.000
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		2.648.361.902
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.648.361.902
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		97.187.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		37.187.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		60.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		613.640.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		18.235.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		54.667.400
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		44.950.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan		28.638.400
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		38.561.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan		5.760.000

	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		422.829.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		411.794.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		50.000.000
	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		72.600.000
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		9.735.000
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>		364.000.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		417.101.640
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		6.800.000
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		88.486.600
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		470.147.229
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		716.668.400
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		12.400.000
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		211.210.000
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		26.300.000

	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		289.000.000
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	Dinas Sosial	213.522.500
2.1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		13.413.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		13.413.000
2.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-		200.109.500
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		16.466.500
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		43.461.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		30.068.000
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	Dinas Sosial	1.116.423.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-		1.116.423.000
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		432.915.000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai		74.378.000

		<i>kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		
	<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial</i>	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>51.812.000</i>
	<i>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Masyarakat</i>	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>331.320.000</i>
	<i>Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>225.998.000</i>
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	Dinas Sosial	1.793.371.900
4.1	<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>	-		<i>25.862.000</i>
	<i>Penjangkauan Anak-Anak Terlantar</i>	<i>Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>9.986.000</i>
	<i>Rujukan Anak – Anak Terlantar</i>	<i>Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>15.876.000</i>
4.2	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	-		<i>1.767.509.900</i>
	<i>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>		<i>82.923.000</i>
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>		<i>267.118.900</i>
	<i>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>1.417.468.000</i>
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	Dinas Sosial	675.747.875
5.1	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	-		<i>648.531.875</i>
	<i>Penyediaan Makanan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat</i>		<i>326.025.875</i>

		(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		6.422.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		309.420.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		6.664.000
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-		27.216.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		27.216.000
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	Dinas Sosial	165.614.276
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		165.614.276
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		121.017.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		20.000.000
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		24.597.276
Jumlah				8.962.994.082

1. Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan KUA/PPAS.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKA-SKPD dengan KUA/PPAS telah sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD *telah* sesuai dengan KUA/PPAS.

- 2. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu anggaran, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD dengan KUA/PPAS.**

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu anggaran, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD telah sesuai dengan KUA/PPAS.

- 3. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran.**

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran sudah bisa diukur.

- 4. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.**

Terdapat harga satuan belanja dalam kegiatan yang tidak menggunakan ***zona normal dekat***, dengan rincian sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp28.638.400,00.
- b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp9.735.000,00.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, penyusunan RKA SKPD belum sepenuhnya mematuhi/menerapkan kaidah – kaidah penganggaran.

- 5. Kelengkapan dokumen pendukung.**

Dokumen pendukung belum lengkap, diantaranya:

- a. Term of Reference/TOR.
- b. Capaian Kinerja.
- c. Standar Pelayanan Minimal.
- d. Perencanaan Kebutuhan BMD

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung *belum* lengkap.

- 6. Koreksi/Perbaikan Yang Belum/Tidak Disetujui.**

Kesimpulan:

- a. Harga satuan belanja dalam kegiatan yang tidak menggunakan ***zona normal dekat***
- b. Dokumen pendukung belum lengkap.

7. Rekomendasi.

- a. Agar menyesuaikan harga satuan belanja dalam kegiatan yang tidak menggunakan ***zona normal dekat***.
- b. Agar melengkapi dokumen pendukung.

Nanga Bulik, 26 Agustus 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lamandau,


M. SYAIFUDIN-ZUHRI, SE.,M.A.P
Pembina
NIP. 19781211 200604 1 006

Inspektur,


Drs. TAHAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660613 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit Hibil Telp/Fax. (0532) 2071633
Nanga Bulik 74662

TANGGAPAN DINAS SOSIAL TERHADAP CATATAN HASIL REVIU (CHR) RKA TA. 2025

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Penyusunan RKA-SKPD belum sepenuhnya mematuhi/menerapkan kaidah-kaidah penganggaran;
2. Dokumen pendukung belum lengkap;

TANGGAPAN :

1. Bawa Penyusunan RKA-SKPD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp28.638.400,00. Sudah menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang tersedia pada Aplikasi SIPD Tahun 2025 bukti dukung terlampir;
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp9.735.000,00.
Sudah menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang tersedia pada aplikasi SIPD 2025 dan bukti dukung terlampir.
2. Terkait dokumen pendukung berupa *Term Of Refference/TOR*, Capaian Kinerja, Standar Pelayanan Minimal dan Perencanaan Kebutuhan BMD terlampir. Data *Term Of Refference/TOR*, capaian kinerja dan Standar Pelayanan Minimal masih menggunakan data tahun sebelumnya sebagai acuan dikarenakan belum dilaksanakan implementasi Tahun 2025.

Nanga Bulik, II September 2024



Lampiran

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
Kantor sebesar Rp28.638.400,00

Sub Kegiatan Belanja

Dinas Sosial

logis*

Cetak Laporan *

Aksi	Sub Kegiatan	Status Sub Kegiatan	Status Rincian	Sebelum Perubahan	Total	
					Pagu Validasi	Total Rincian
	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor *				28,638,400	0028,638,400.000 00

Banyak per halaman 20 ▼ 1 - 1 of 1 (C) (R) (S)

Lihat Rincian Belanja

X

Objek Belanja *	Belanja Barang Jasa dan Modal
Rekening / Akun *	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Pengelompokan Belanja / Paket Pekerjaan *	Pengelompokan Belanja
Uraian Pengelompokan Belanja / Paket Pekerjaan *	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Sumber Dana *	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jenis Standar Harga *	SSH
Komponen *	Susu Beruang
TKDN	90 %
Spesifikasi Komponen	Bear Brand
Satuan *	Dus
Harga Satuan *	Rp 335,000.00
Keterangan *	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

PP.12 Tahun 2023
 1. Belanja Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sifatnya tidak terbatas pada lokasi dan waktu. Selain itu, standar harga tetap bersifat
 permatang dan stabil.
 2. Standar harga selalu relevan dengan masa yang ditetapkan.
 3. Standar harga selalu relevan dengan masa yang ditetapkan.

Standar Harga Belanja		Visa Belanja	Rincian					
			Kode Komponen	Jenis Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	Persentase
-	- NSPA							
-	- ASS		8.1.02.01.01.0053 Belanjakanan dan Minuman Jaminan Tersu					
-	- SBU		8.1.02.01.01.0042.0012	Visa Belanja	Ber Brand	Box	Rp 2.680.000	100%

- b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp9.735.000,00.

Sub Kegiatan Belanja

Dinas Sosial

1.06.01.2.07.0006	
Pengadaan	9.735.000,00
Peralatan dan	9.735.000,00
Mesin Lainnya	0,00

Lihat Rincian Belanja

X

Objek Belanja *	Belanja Barang Jasa dan Modal	
Rekening / Akun *	5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin	
Pengelompokan Belanja / Paket Pekerjaan *	Pengelompokan Belanja	
Urutan Pengelompokan Belanja / Paket Pekerjaan *	Belanja Modal Alat Pendingin	
Sumber Dana *	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Jenis Standar Harga *	SSH	
Komponen *	Lemari Es SHARP SJ-N162 D	
TKDN	33,83 %	
Spesifikasi Komponen	Type : 1 Door Top Freezer, Cooling System : Direct Cooling System, Low W	
Satuan *	Unit	
Harga Satuan *	Rp 2.680.000,00	
Keterangan *	Belanja Modal Alat Pendingin	

- Regulations**
- Science**
- Sustainable Indicators**
- Proportion**
- Units**
- RIS**
- Proportion**

Lihat Rincian Belanja

x

Objek Belanja *	Belanja Barang Jasa dan Modal	
Rekening / Akun *	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Pengelompokan Belanja / Paket Pekerjaan *	Pengelompokan Belanja	
Uraian Pengelompokan Belanja / Paket Pekerjaan *		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Sumber Dana *	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Jenis Standar Harga *	SSH	
Komponen *	Speaker Advance K 1512 B	
TKDN	45 %	
Spesifikasi Komponen	Color: Black, Material: ABS & aluminum alloy, Dimensions: 630 x 430	
Satuan *	Unit	
Harga Satuan *	Rp 2,055,000.00	
Keterangan *	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	

PP 12 Tahun 2016
1. Bantuan dana untuk kegiatan dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) berpedoman pada standar harga satuan regional analisis standar berdasarkan standar harga satuan regional
permenperdag dan
2. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden
3. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan teknis penentuan standar harga satuan perdata meningkatkan kinerja

Speaker Advance K 1512 B

Ambip

Kode Klasifikasi	Nama Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	PKTW
1.3.02.05.02.0006 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		Color: Black Material ABS & aluminum alloy Dimensions: 630 x 430 x 320 mm Voltage: 110v - 220v RMS Watt: 100w / 1500W PMPO: Woofie size 15", 0.8kW Battery Rechargeable	Unit	Rp 2.055.000,00	45%
1.3.02.05.02.0006 (0007)	Speaker Advance K 1512 B				

Industri dan Tani di Samarinda. Peranakan daerah Kalimantan/Kota yang Memerlukan pada Sasaran RSPD :

Digitized by srujanika@gmail.com

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	Indeks Gini	0,318	0,302	0,290	0,280	0,33			Capaian Realisasi menggunakan data 2023, karena belum ada perhitungan di tahun 2024
2	Persentase Penduduk Miskin	3,34	3,2	3,06	2,92	3,12			Capaian di TW I masih rendah dikarenakan kegiatan bersifat situasional dan angka tersedia pada TW berikutnya
3	Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan sosial	41	42	43	44	2,5			

Sumber RPD Kab. Lamandau Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		
Sosial											
1	Jumlah Lansia, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim yang mendapatkan bantuan sosial berbentuk kartu layanan	Orang	305	0							
2	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	2928	65							
3	Jumlah anak terlantar/putus sekolah yang mengikuti pelatihan di PSBR dan PSKW	Orang	23	3							
4	Jumlah lansia yang mendapatkan paket permakanan	Orang	155	0							

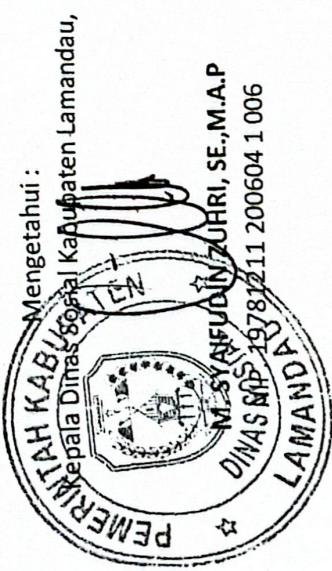
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL TW II				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
		INDIKATOR	TARGET (%)	CAPAIAN (%)			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	75.51	17.29	367,673,965	21,246,600	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	76.92	16.79	19,983,000	6,891,400	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	95.38	18.46	512,378,500	57,119,500	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	83.24	17.77	195,244,750	54,119,400	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	0.33	2.55	808,614,875	336,801,100	
JUMLAH			14.57	1,903,895,090	476,178,000		



RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH TA. 2025
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

NO.	JENIS BARANG YANG DIBUTUHKAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	Sepeda Motor Matic	2	Unit	25,000,000	50,000,000	
2	Backdrop ruang rapat Multiplex HPL	33	meter	2,200,000	72,600,000	
3	Gordyn/Kray Tarik Set	50	Meter	899,000	44,950,000	
4	Lemari Es / Kulkas	1	Buah	2,680,000	2,680,000	
5	Speaker Aktif Advance	1	Buah	2,055,000	2,055,000	
6	Pembangunan Mushola	1	Unit	244,000,000	244,000,000	
Total					416,285,000	



Pengurus Barang,

SUPIR MANSYAH
NIP. 19840410 201212 1 002